

ABSTRAK

Antibiotika menjadi obat andalan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, namun seringkali disalahgunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotika. Menurut Riskedas (2013), 85,5% rumah tangga di wilayah Kabupaten Kulon Progo menyimpan antibiotika tanpa resep yang bersumber dari Apotek (41,1%) sebagai obat persediaan. Apoteker berperan penting untuk meminimalkan kejadian tersebut dengan mengoptimalkan penerapan layanan farmasi klinis berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelayanan farmasi klinis yang diberikan oleh Apoteker di Apotek wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan rancangan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, sehingga melibatkan 30 Apoteker yang memenuhi kriteria inklusi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil disajikan dalam bentuk tabel. Hasil diinterpretasikan berdasarkan kategori baik, jika distribusi jumlah Apoteker yang sudah menerapkan pelayanan farmasi klinis berdasarkan standar >75%; kategori cukup (60–75%), dan kurang (<60%).

Hasil yang diperoleh: Apoteker yang sudah menerapkan layanan farmasi klinis berdasarkan standar dengan kategori baik adalah 15 orang; kategori cukup 9 orang; dan kategori kurang 6 orang.

Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa, hanya sebagian (50%) Apoteker di Apotek wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sudah menerapkan layanan farmasi klinis dengan kategori baik berdasarkan standar yang berlaku.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Kefarmasian, Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan farmasi klinis, antibiotika, apotek, apoteker, Kulon Progo.

ABSTRACT

Antibiotics are the mainstay for curing diseases caused by bacterial infections, but they are often used to treat diseases that do not actually require antibiotics. According to Riskedas (2013), 85.5% of households in Kulon Progo Regency store antibiotics without prescriptions sourced from pharmacies (41.1%) as an inventory drug. Pharmacists play an important role in minimizing these events by optimizing the application of clinical pharmaceutical services based on Indonesian Minister of Health Regulation Number 73 of 2016. This research was conducted to determine the description of clinical pharmaceutical services provided by pharmacists in the pharmacy of Kulon Progo Regency.

The research used the descriptive method with a *cross-sectional* design. The *purposive* sampling-technique involved 30 pharmacists who met the inclusion criteria. The data were analyzed using descriptive statistics. The results are presented in the form of a table. The results are interpreted as good if the distribution of pharmacists who have implemented clinical pharmaceutical services based on standards is greater than 75%, adequate (60-75%), or less (60%).

According to the findings, there are 15 pharmacists who have implemented clinical pharmacy services based on standards with good categories; there are enough categories for 9 people; and there are less categories for 6 people

From the observations, it can be concluded that only one (50%) pharmacist in the pharmacy of Kulon Progo Regency has implemented clinical pharmacy services in the good category based on applicable standards.

Keywords: Pharmaceutical Service Standards, Indonesian Minister of Health Regulation Number 73 of 2016, clinical pharmacy services, antibiotics, pharmacies, pharmacists, Kulon Progo.